



KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 208 TAHUN 2021  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Program Penyusunan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
5. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa menyampaikan laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Utama melalui Biro SDM, Organisasi dan Hukum.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA direviu oleh Biro SDM, Organisasi dan Hukum sebagai bahan evaluasi Program Penyusunan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
 ANTARIKSA NASIONAL  
 NOMOR 208 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA  
 PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2021

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2021

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
1.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh	BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SATELIT Bagian Kesatu Perencanaan Bagian Kedua Pembangunan BAB III RENCANA TEKNIS PENGOPERASIAN STASIUN BUMI BAB IV METODE DAN KUALITAS PENGOLAHAN DATA Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Pengolahan Data Primer Menjadi Data	Amanat dari PP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Inderaja, Pasal: a. Pasal 8 ayat (3) b. Pasal 14 ayat (4) c. Pasal 34 ayat (3) d. Pasal 38 ayat (3) e. Pasal 48 ayat (2) f. Pasal 51 ayat (4) g. Pasal 52 ayat (1)	Deputi Inderaja/Pusat KKPA

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
		<p>Proses            Bagian Ketiga Pengolahan Data Proses Menjadi Analisis Informasi            Bagian Keempat Kualitas Pengolahan Data            Bagian kelima Koordinasi Pelaksanaan Pengolahan Data</p> <p>BAB V PENYIMPANAN DATA DAN            Amanat dari PP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Inderaja,            Pasal:            a. Pasal 8 ayat (3)            b. Pasal 14 ayat (4)            c. Pasal 34 ayat (3)            d. Pasal 38 ayat (3)            e. Pasal 48 ayat (2)            f. Pasal 51 ayat (4)            g. Pasal 52 ayat (1)            LAPAN Status terkahir:            Telah melaksanakan PAK I pada tanggal 29 Juli 2020 via daring</p> <p>FORMULIR LAMPIRAN            DAFTAR RANCANGAN</p>		

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
		PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2021 PENDISTRIBUSIAN DATA Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Standar dan Prosedur Penyimpanan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Penyediaan Data Bagian Ketiga Standar dan Prosedur Pendistribusian Data BAB VI PEMANFAATAN DATA DAN DISEMINASI INFORMASI Bagian Kesatu Pemanfaatan Data Bagian Kedua Diseminasi Informasi Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Lembaga Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah		

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
		BAB VII KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN SPBN BAB VIII KRITERIA INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
2.	Peraturan LAPAN tentang Akun, Kata Sandi, Surat Elektronik dan Internet	Peraturan LAPAN tentang Akun, Kata Sandi, Surat Elektronik dan Internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun, Kata Sandi, Surat Elektronik dan Internet di Lingkungan Departemen Keuangan.</li> <li>2. Perla Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) di lingkungan LAPAN.</li> <li>3. SE Menteri PANRB Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah.</li> <li>4. Peraturan ANRI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Surat Elektronik Kedinasan dan Penggunaan Internet.</li> </ol>	Pustikpan



NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
3.	Peraturan Kepala LAPAN tentang Satu Data LAPAN	Peraturan Kepala LAPAN tentang Satu Data LAPAN	Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Pustikpan
4.	Peraturan LAPAN tentang Kebijakan dan Standar SMPI	Peraturan LAPAN tentang Kebijakan dan Standar SMPI	1. ISO 27001. 2. Perla Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) di lingkungan LAPAN. 3. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.	Pustikpan
5.	Peraturan Kepala LAPAN tentang Pengelolaan Laman Web LAPAN	Peraturan Kepala LAPAN tentang Pengelolaan Situs <i>Web Official</i> LAPAN	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Pustikpan
6.	Peraturan Kepala LAPAN tentang Standar Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan LAPAN	Peraturan Kepala LAPAN tentang Tata Kelola Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Pustikpan
7.	SOP Penanganan Benda Jatuh Antariksa	Peraturan Lembaga ini mengatur tentang identifikasi, Penyerahan, dan Investigasi Benda Jatuh Antariksa	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pasal 58-62	Pusat Sains Antariksa
8.	Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang	Peraturan ini mengatur	UU Nomor 9 Tahun 2018	Pusat Sains Antariksa

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
	berlaku di Pusat Sains Antariksa (usulan perubahan PNPB LAPAN)	tentang jenis dan tarif layanan di Pusat Sains Antariksa	tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
9.	Peraturan terkait bekerja di lingkungan berbahaya (2) peraturan terkait besar living allowance, tunjangan kedatangan dan asuransi untuk pegawai yang dikirim training ke luar negeri	Peraturan terkait bekerja di lingkungan berbahaya (2) peraturan terkait besar living allowance, tunjangan kedatangan dan asuransi untuk pegawai yang dikirim training ke luar negeri	-	Pusat Teknologi Roket
10.	Peraturan pengadaan barang dan jasa khusus (terkait dengan barang dan jasa strategis)	Peraturan pengadaan barang dan jasa khusus (terkait dengan barang dan jasa strategis)	-	Pusat Teknologi Roket
11.	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Tugas Fungsi dan Organisasi di Lingkungan LAPAN	-	Biro SDM Orkum
12.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pedoman dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan LAPAN	-	Biro SDM Orkum
13.	Perka Manajemen Talenta PNS di Lingkungan LAPAN	Manajemen Talenta PNS di Lingkungan LAPAN	-	Biro SDM Orkum
14.	Perka 5 OTK Balai	Tugas Fungsi dan Organisasi pada OTK Balai	-	Biro SDM Orkum
15.	Perka Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-	Biro SDM Orkum

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA
16.	Perka Klasifikasi Arsip	Perka Petunjuk Teknis Pemberkasan Naskah Dinas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Perla Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2021, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
17.	Perka Penyusutan Arsip	Perka Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Perla Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2021, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN